

# Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui SDGs Desa di Desa Kemojing, Cilacap

B. S. Pambudi<sup>1</sup>, R. Setiadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>PT. Wahana Ottomitra Multiartha ( WOM Finance ) Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

## Article Info:

Received: 05 July 2022

Accepted: 05 July 2022

Available Online: 23 April 2024

## Keywords:

Gender Integration, SDGs Desa, Development Planning

## Corresponding Author:

Bagas Satya Pambudi  
Diponegoro University,  
Semarang, Indonesia  
Email: [bagassatya6@gmail.com](mailto:bagassatya6@gmail.com)

**Abstract:** *The development model in Indonesia which is centralized and top-down creates many gaps in the achievement of development outcomes, such as the gap between men, women and marginalized groups in gaining access, control, participation, and benefits of development programs/activities, especially in rural in Indonesia. These four aspects need to be implemented in gender responsive planning through policies and programs systematically by placing priority on gender equality, one of which is through the SDGs Desa. This study looks at the level of implementation of gender integration through SDGs Desa in relation to rural development planning in Kemojing Village as a pilot project. The research was conducted with a quantitative approach through data collection techniques in the form of questionnaires up to 90 respondents, interviews, field observations, and document review. The analytical technique used includes 2 technical analysis, checklist analysis and scoring analysis. The checklist produces the level of disclosure while the scoring produces the aspect index value. The results showed that the characteristics of the existing planning in Kemojing Village were 81.67% gender responsive to indicators of aspects of participation, access, benefits, and control. This is supported by the role of the Government in planning an integrated village program, through which village facilitators have succeeded in increasing individual capacity in updating data. Regarding the level of gender integration in the Desa Terpadu Program, the community participation aspect reached 45.19%, the access aspect was 82.59%, the benefit aspect was 70.37%, and the control aspect was 88.52%. The success of implementing gender integration in existing planning and program in Kemojing Village is superior in terms of control and access. This indicates that the closedness of community participation is still a challenge regardless of the participatory approach used in the SDGs Desa. Research findings become input in determining planning policies and efforts to realize gender responsive planning and the sustainability of village development programs.*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

## How to cite (APA 6th Style):

Pambudi, B. S., & Setiadi, R. (2024). Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui SDGs Desa di Desa Kemojing, Cilacap. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 13(1), 67–79.

## 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), desa memiliki peran sangat strategis mendukung pencapaiannya. Untuk itu pembangunan desa diarahkan menjadi pembangunan desa berkelanjutan melalui SDGs Desa. Pendekatan partisipatoris yang menjadi dasar pendekatan pembangunan selama ini belum mampu menentukan hakikat pembangunan itu sendiri. Keputusan tergantung pada hasil musyawarah, sehingga terkadang kebutuhan obyektif desa ditangani oleh

keputusan musyawarah. Pada titik ini, penting untuk melokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menembus ke skala kecil desa. Kolaborasi para pihak di desa bertujuan untuk mencapai tujuan SDGs dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pusat gerakan dari penyelenggaraan dan pembangunan desa berkelanjutan adalah “partisipasi masyarakat desa” yang melibatkan segmentasi gender didalamnya (Akbar et.al., 2020). Prinsip SDGs yang meliputi universalitas, komprehensif dan inklusif memberikan atmosfer yang sangat kondusif bagi penguatan kesetaraan gender (Masuda et.al., 2021).

Melalui perangkat perencanaan dan penganggaran, desa memainkan peran strategis dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi ketimpangan di antara anggota masyarakat. Namun, masih banyak tantangan di tingkat administrasi dan di tingkat masyarakat desa. Tantangan-tantangan ini termasuk memahami pentingnya perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran desa. Integrasi gender dalam perencanaan pembangunan berarti melihat bagaimana eksistensi gender diakomodir dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan peluang dan kesempatan serta memperoleh manfaat yang sama dalam mengisi pembangunan. Pada kenyataannya isu ketimpangan gender masih kuat dalam hal pembangunan. Ketimpangan gender di desa biasanya terjadi pada perempuan, kelompok terpinggirkan, yang lemah dan rentan baik secara posisi, keadaan fisik maupun stigma sosial atau biasa disebut kelompok marjinal. Keberadaan gender jarang terwakili dan oleh karena itu tidak memiliki akses ke perencanaan dan pengambilan keputusan atau manfaat dari keputusan yang dibuat (Burgess, 2008). Akibatnya, program pembangunan desa tetap netral dan tidak bisa secara langsung berkontribusi mengurangi kesenjangan gender. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan responsif gender melalui integrasi gender untuk memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar memberikan implikasi relasi gender yang setara.

Implementasi *gender-responsive planning* membutuhkan komitmen kebijakan dan program secara sistematis, menempatkan prioritas pada kesetaraan gender dan melihat lebih jauh dari target tertentu untuk fokus pada bagaimana kesetaraan gender relevan di semua SDGs (ADB, 2018). Sejalan dengan itu, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menyebut aspek gender dalam pembangunan terkait pelaksanaan strategi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan nasional sesuai dengan lembaga, fungsi dan kewenangan otoritas daerah masing-masing. Faktor kunci implementasi SDGs di desa terletak pada dinamisnya perangkat pemerintahan desa. Beberapa lembaga desa sangat penting, seperti pemerintah desa, agenda desa yang mewujudkan kehendak rakyat, badan masyarakat desa, dan masyarakat itu sendiri melalui partisipasi.

Pembangunan responsif gender dilaksanakan dengan mempertimbangkan partisipasi, akses, kontrol dan manfaat yang setara bagi seluruh golongan masyarakat (Bappenas, 2012). Aspek akses, yaitu mengukur seberapa besar peluang dan kesempatan, terutama kelompok terpinggirkan untuk memanfaatkan sumber daya baik alam, sosial, politik maupun waktu; partisipasi yakni keterlibatan atau keterwakilan kelompok terpinggirkan (perempuan dan marjinal) dalam program, kegiatan, pengambilan keputusan dalam pembangunan untuk melihat besaran proporsi kelompok dalam masyarakat yang terpinggirkan; sedangkan kontrol yakni kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut; serta manfaat berkaitan dengan hasil-hasil dari suatu proses pembangunan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima kelompok terpinggirkan, apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu kelompok dalam masyarakat. Pertimbangan keempat aspek tersebut digunakan sebagai penilaian dalam menganalisis besaran integrasi gender pada perencanaan eksisting dan implementasi rencana pada program hasil SDGs Desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tingkat penerapan integrasi gender dalam perencanaan pembangunan desa melalui SDGs Desa di Desa Kemojing, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengarusutamaan gender pada perencanaan pembangunan, khususnya di desa.

## 2. DATA DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Metode kuantitatif digunakan karena terdapat karakteristik numerik pada data yang digunakan sehingga membutuhkan penjelasan hasil olahan data baik berupa persentase, rata-rata, tingkat, dan lainnya. Metode penelitian kuantitatif didasarkan pada filosofi positivistik, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan alat penelitian kuantitatif atau statistik untuk tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini berfokus pada penggunaan data primer hasil survei lapangan. Pengambilan data secara langsung dilaksanakan menggunakan formulir checklist kepada pemerintah desa dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Kemojing. Terdapat dua teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, kedua analisis tersebut adalah analisis checklist yang menghasilkan tingkat pengungkapan dan analisis skoring yang menghasilkan nilai index aspek. Kedua analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan empat aspek integrasi gender yakni partisipasi, akses, manfaat, dan kontrol.

Analisis checklist menurut Bentzen (dalam Sulisworo dan Irfan, 2016) termasuk metode tertutup karena tidak menggambarkan data atau peristiwa mentah, hanya keputusan/kesimpulan perekam mengenai kriteria. Data-data hasil pencatatan akan diolah menggunakan pendekatan kuantitatif meliputi data yang berkaitan dengan karakteristik perencanaan responsif gender dan kondisi eksisting perencanaan pembangunan Desa Kemojing serta menjelaskan peran Pemerintah dalam kegiatan SDGs Desa di Desa Kemojing yang dilihat melalui kapasitas kelembagaan desa. Data yang dianalisis menggunakan teknik ini merupakan rekapitulasi jawaban *ya/tidak* dan keterangan pada isian formulir checklist. Hasil rekapitulasi tiap formulir kemudian dibagi dengan total kriteria pertanyaan dalam aspek yaitu 20 kriteria kemudian dikalikan 100%. Gunanya untuk menghitung tingkat pengungkapan perencanaan responsif gender di Desa Kemojing. Jika diasumsikan jumlah pengisi lembar checklist berjumlah  $n$  orang (Pemerintah Desa Kemojing), maka rata-rata tingkat pengungkapan dari checklist dirumuskan sebagai berikut:

$$MTn = \frac{t1+t2+\dots+tn}{n} \quad (1)$$

Dimana  $MTn$  adalah Hasil rata-rata tingkat pengungkapan (persentase),  $tn$  adalah Tingkat pengungkapan pengisi ke- $n$ , sedangkan  $n$  adalah Jumlah pengisi formulir. Hasil analisis dideskripsikan untuk memperjelas informasi dan hasil yang didapatkan terkait karakteristik perencanaan dan bagaimana upaya yang dilakukan terkait perencanaan responsif gender di Desa Kemojing.

Analisis skoring yang dilakukan pada penelitian ini dinyatakan dalam skala likert untuk mengukur tingkat integrasi gender dalam program SDGs Desa yang menjawab sasaran kedua. Analisis ini dilakukan dengan melihat integrasi gender dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Skor yang digunakan yaitu antara 1-3 (sesuai aturan likert ganjil) untuk masing-masing kriteria yakni kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian hasil data responden yang sudah memilih, dianalisis menggunakan teknik skoring untuk mendapatkan total nilai skor, persentase masing-masing kriteria, nilai rata-rata dan modus (nilai dominan muncul). Teknik skoring dilakukan pada setiap kuesioner dengan memberikan pilihan pada tiga kemungkinan jawaban responden dalam satu pertanyaan. Pilihan jawaban digunakan sebagai skor untuk menjelaskan pandangan dan penilaian masyarakat terhadap metrik pertanyaan. Variabel-variabel yang ada akan ditransformasikan ke dalam indikator-indikator yang terukur, yang selanjutnya akan digunakan dalam kerangka membangun alat-alat berupa pertanyaan-pertanyaan.

Untuk menerjemahkan hasil perhitungan skala likert, digunakan analisis interval dengan melakukan pembobotan atau skoring. Proses penentuan skor pada jawaban responden dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung kepada tanggapan responden. Perhitungan skoring dengan skala likert dalam penelitian ini mencakup beberapa Langkah berikut:

1. Kriteria Skor

**Tabel 1.** Kriteria Skor

Kriteria	Skor
Tinggi	3
Cukup	2
Rendah	1

2. Skor Ideal

Kriteria/indikator tersebut kemudian disesuaikan dengan variabel tertentu dari masing-masing sasaran penelitian. Setelah melakukan penentuan skor masing-masing jawaban menggunakan nilai 1/2/3 sebagai kemungkinan pilihan, selanjutnya dilakukan perhitungan skor ideal untuk mendapatkan skala skor tertinggi dan terendah. Jumlah skor ideal keseluruhan nilai dihitung menggunakan rumus skor ideal sebagai berikut:

$$Skor\ Ideal = Nilai\ Skala \times Jumlah\ Responden \tag{2}$$

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 90 sampel (dibulatkan) yang mewakili populasi dengan nilai skor tertinggi yaitu 3, maka skor ideal yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Kriteria Skor Ideal

Kriteria	Skala	Keterangan
3 x 90 = 270	Tinggi	<b>Skor tertinggi</b>
2 x 90 = 180	Cukup	Skor menengah
1 x 90 = 90	Rendah	<b>Skor terendah</b>

3. Hasil Skoring

$$Interval = \frac{100\%}{Jumlah\ Likert} \tag{3}$$

$$= \frac{100\%}{3} = 33,33\%$$

$$Hasil = (Skor \times Responden) / Jumlah\ Skor\ Ideal \times 100\% \tag{4}$$

Kriteria interpretasi skor:

0% – 33,33% = Rendah; 33,33% - 66,67 % = Cukup; 66,67% - 99,99%~100% = Tinggi

4. Perhitungan Nilai Index Aspek

Saat mengukur setiap kriteria direpresentasikan oleh pertanyaan yang terdapat pada kuisioner dengan beberapa pertanyaan yang diberikan contoh kasus. Jawaban yang terdapat dikuisisioner juga disesuaikan dengan tingkatan kriteria skor yang telah ditentukan sehingga hasil dari kuisioner tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai akhir tingkat integrasi gender dalam perencanaan program desa terpadu di Desa Kemojing. Masing-masing kriteria tersebut dihitung bobotnya dengan cara sebagai berikut:

**Kriteria 1 (Aspek 1)**

Skor 1 = Nilai 1 x jumlah responden yang memilih jawaban dengan skor 1

Skor 2 = Nilai 2 x jumlah responden yang memilih jawaban dengan skor 2

Skor 3 = Nilai 3 x jumlah responden yang memilih jawaban dengan skor 3

**(Skor 1 + Skor 2 + Skor 3) / skor ideal (skor tertinggi = 270) x 100% = skoring kriteria 1**

Perhitungan yang sama dilakukan pada Kriteria 2 (Aspek 1) dan selanjutnya.

**Perhitungan nilai index Aspek 1**

Kriteria 1 (bobot 50%) = skoring kriteria 1 x 0,5 = nilai index k.1

Kriteria 2 (bobot 50%) = skoring kriteria 2 x 0,5 = nilai index k.2

**nilai index k.1 + nilai index k.2 = nilai index Aspek 1**

**Tabel 3.** Pembobotan Nilai Index Aspek

Aspek	Kriteria	Bobot
Partisipasi	Mengikuti kegiatan pelaksanaan SDGs Desa	50
	Ikut serta dalam menyebarkan informasi	50
Akses	Adanya kesempatan yang sama dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya dalam program SDGs Desa.	50
	Peluang memberikan gagasan terkait pengambilan keputusan	50
Manfaat	Adanya manfaat yang diterima dari program SDGs Desa yang akan berjalan	100
Kontrol	Ikut serta dalam pengambilan keputusan pada rencana program SDGs Desa	50
	Mengambil keputusan terhadap penggunaan dana	50

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Karakteristik Responden**

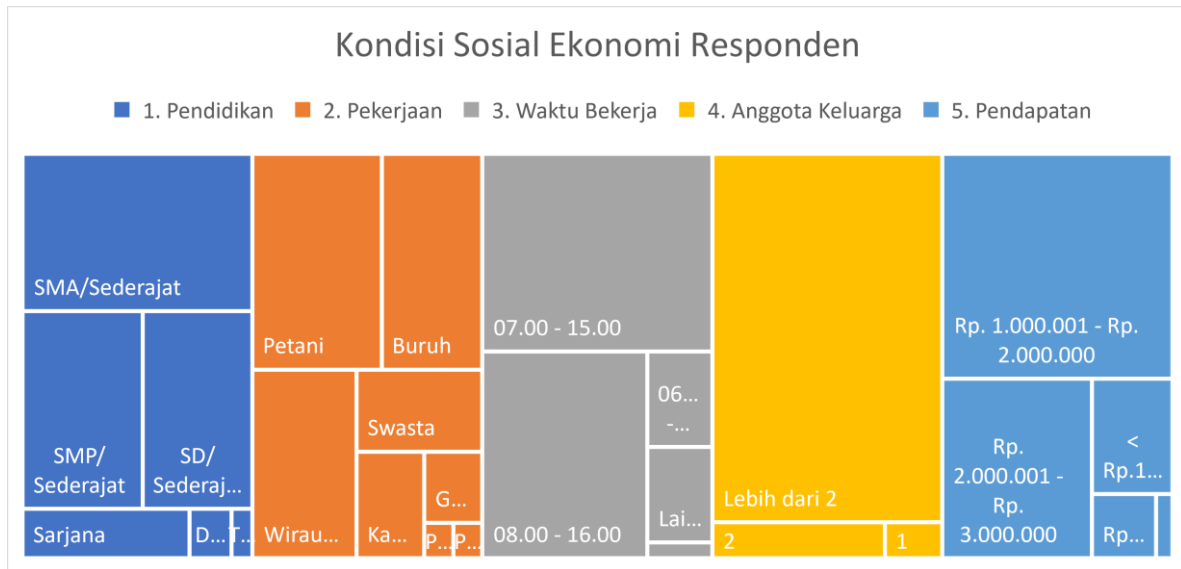
Berdasarkan hasil kuisisioner, didapatkan bahwa segmentasi responden berasal dari perwakilan rumah tangga yang merupakan bagian dari lapisan masyarakat (gender) berupa laki-laki, perempuan, dan kelompok marjinal (warga kurang mampu, disabilitas, janda, dan pendatang). Distribusi kuisisioner tersebar ke 4 RT berbeda yakni RT 08, 09, 10, dan 11 sesuai amanat kepala desa untuk memudahkan mobilisasinya. Kuisisioner tersebut diisi oleh perwakilan KK (satu orang yang mengisi). Alokasi penyebaran kuisisioner per RT disesuaikan dengan kondisi masing-masing RT termasuk jumlah KK yang ada di masing-masing RT sehingga rata-rata hanya diambil 10-20 sampel responden per RT. Karakteristik responden berdasarkan gender yang mengisi kuisisioner memiliki rasio 6:2:1 dan bisa dijabarkan dalam gambar berikut:

**Tabel 4.** Pengambilan Sampling Responden

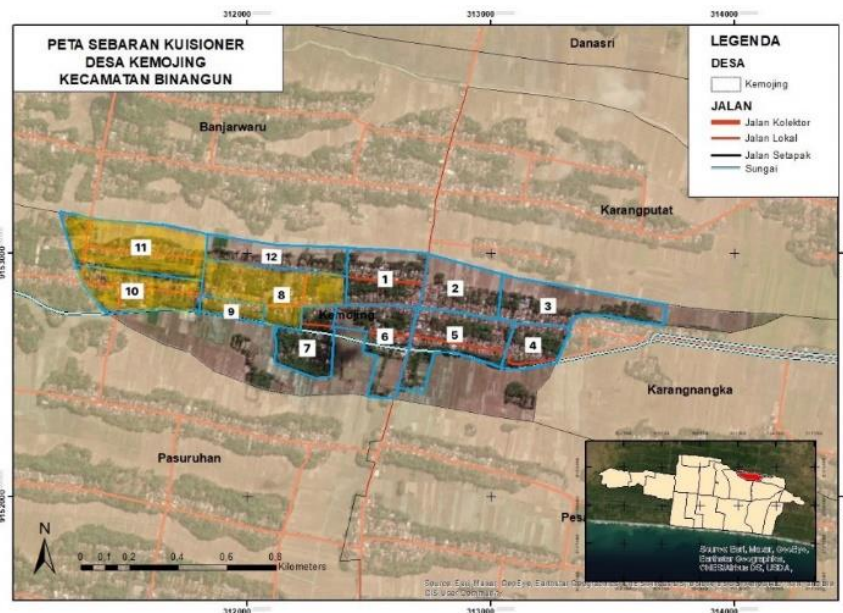
Eksisting		Responden		
GENDER	KK	USIA	JUMLAH	Total
Laki-laki	652	18-32	5	60
		33-47	35	
		48-62	18	
		>62	2	
Perempuan	152	18-32	4	20
		33-47	11	
		48-62	5	
		>62	0	
Kelompok Marginal	174	18-32	0	10
		33-47	5 (L=4 P=1)	
		48-62	5 (L=4 P=1)	
		>62	0	

Mayoritas responden yang mengisi kuisisioner merupakan laki-laki berusia 33-47 tahun yang merupakan kepala keluarga aktif. Begitu pula dari perempuan, kelompok umur 33-47 mendominasi pengisian kuisisioner sebagai perwakilan satu rumah tangga. Kemudian untuk kelompok marjinal, hanya ada 2 kelompok umur, yang masing-masing berisi 5 orang dengan jumlah laki-laki mencapai 4 orang dan 1 orang perempuan. Kedua perempuan di kelompok umur marjinal merupakan perempuan renta berstatus janda yang hidup sendiri. Sedangkan untuk laki-laknya merupakan warga kurang mampu. Lalu, untuk kondisi sosial ekonomi responden dapat dilihat pada grafik di Gambar 1 yang kemudian distribusi kuisisioner kepada responden digambarkan pada peta sebaran Gambar 2.

**Gambar 1.** Kondisi Sosial Ekonomi Responden (Analisis, 2022)



**Gambar 2.** Sebaran Kuisisioner Program Desa Terpadu (Analisis, 2022)



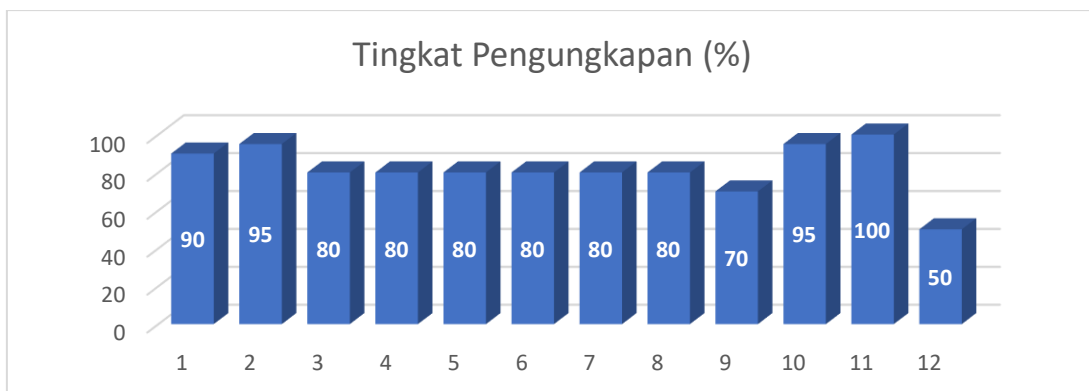
**Analisis Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui SDGs Desa**

Dalam penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui tingkatan integrasi gender pada perencanaan dan implementasi rencana melalui SDGs Desa. Sesuai dengan Permendesa Nomor 21 tahun 2020, pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Untuk mengetahui seperti apa perspektif gender telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, maka dilakukan penelusuran dengan formulir checklist. Formulir checklist memeriksa perencanaan dari perspektif responsif gender.

Dalam setiap formulir *checklist* tersebut akan mengungkapkan hasil berupa persentase perencanaan responsif gender berdasarkan penilaian responden dimana dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Kemojing yang berjumlah 12 orang termasuk di dalamnya 5 BPD dan 2 orang yang merangkap tugas sebagai TPD. Tingkat pengungkapan ini merupakan penilaian objektif perangkat desa kemojing sebagai pihak *provider* dalam pelaksana pembangunan desa. Penilaian ini kemudian dikompilasi untuk menghasilkan tingkat pengungkapan rata-rata yang merepresentasikan tingkat responsif gender pada perencanaan pembangunan Desa Kemojing.

**Gambar 3.** Tingkat Pengungkapan Perencanaan Responsif Gender (Analisis, 2022)

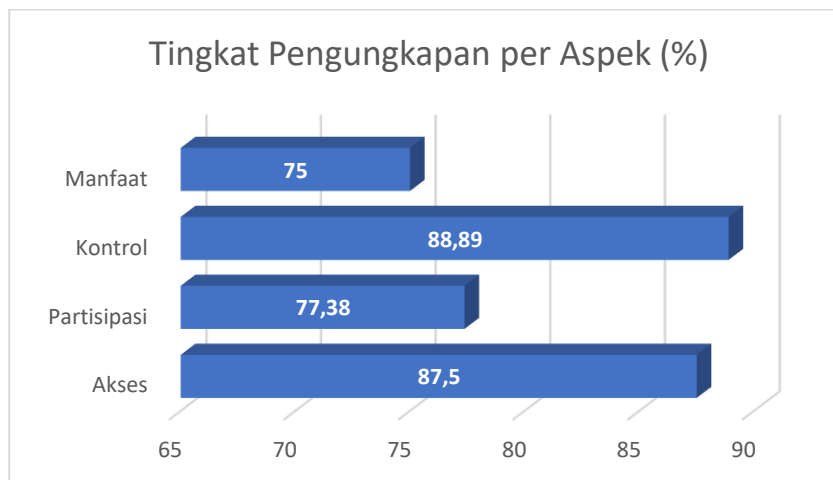


Dari rincian tingkat pengungkapan tersebut, dapat dihitung rata-rata tingkat pengungkapan dengan menjumlahkan semua nilai yang dibagi dengan jumlah total responden. Hasilnya, rata-rata tingkat pengungkapan berada di angka 81,67%. Hal ini artinya bahwa kondisi perencanaan eksisting di Desa Kemojing sudah **81,67% responsif gender**. Kemudian 95% dari responden menilai bahwa tingkat responsif gender pada perencanaan pembangunan desa sudah lebih dari 70% yang dikategorikan responsif. Sedangkan satu penilaian mengungkap bahwa tingkat responsif gender di Desa Kemojing hanya 50%. Indikasi mengapa ada satu responden yang menilai demikian adalah kenyataan dilapangan bahwa perempuan dan kelompok marjinal masih belum terlibat mendorong dan menginisiasi rancangan dan kebijakan terutama di tingkat Desa dan kabupaten di wilayah program. Perihal tersebut, sebenarnya mereka sudah memiliki persepsi kritis di beberapa kelompok perempuan dan juga berpartisipasi dalam rencana pembangunan desa. Akan tetapi, sebagian perempuan belum mendapatkan dukungan sosial yang memadai, mereka seringkali harus berpartisipasi untuk dapat mengakses sumber daya demi mendapatkan kesejahteraan. Bila dilihat berdasarkan tiap aspek integrasi gender dalam perencanaan pembangunan desa, maka tingkat pengungkapannya akan seperti pada Gambar 4.

Peraturan pemerintah terkait desa mengintegrasikan pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari perencanaan dan penganggaran. Hal ini meliputi kebijakan desa, program, pelaksanaan kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi. Pemerintah Desa Kemojing menilai bahwa capaian >70% untuk semua aspek menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Desa Kemojing memang layak dikatakan responsif gender. Dari diagram tersebut, Pemerintah Desa Kemojing menilai bahwa 87.5 % masyarakat khususnya perempuan dan kelompok marjinal memiliki hak yang setara dengan masyarakat lainnya untuk menjadi bagian dari kelembagaan desa maupun tim penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Kemudian terkait dengan aspek partisipasi, 77,38 % masyarakat hadir secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran di Desa Kemojing. Warga menyuarakan gagasannya dalam membangun desa termasuk menyuarakan gagasan pemikiran untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan termasuk warga miskin. Terkait manfaat, 75% rencana/daftar kegiatan usulan yang diperuntukkan bagi masyarakat telah tepat sasaran, khususnya untuk kelompok perempuan dan warga miskin (atau marjinal lainnya). Sedangkan dengan

aspek kontrol, Pemerintah menilai bahwa 88,89% kelompok masyarakat (terutama perempuan dan warga miskin) dapat diberi kesempatan melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan desa.

**Gambar 4.** Tingkat Pengungkapan Aspek Perencanaan Responsif Gender (Analisis, 2022)



Terkait SDGs di desa Kemojing, pemerintah desa melakukan Musdes untuk mengecek hasil pemutakhiran data SDG desa. Pelaksanaan Musdes dipimpin oleh kepala BPD didampingi perwakilan Bupati, dan pemaparan dipimpin oleh sekretaris desa selaku ketua Pokja Relawan Pemutakhiran Data. Perwakilan dari masyarakat desa juga hadir, seperti tokoh/tokoh masyarakat serta tokoh perwakilan kelompok masyarakat. Demi Musdes yang efektif, anggota masyarakat yang diundang dapat diberikan preferensi, yang berkepentingan dengan materi yang sedang dibahas karena memang sebelumnya perencanaan pembangunan desa sudah dimulai di tingkat dusun dengan diskusi untuk mengetahui ide-ide tentang aspirasi masyarakat di masing-masing dusun pasca tahap pemutakhiran data SDGs Desa. Selain itu, Musdes dapat dikaitkan dengan faktor masyarakat lainnya tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat. Namun, berdasarkan penuturan narasumber, tampak bahwa hanya tokoh masyarakat tertentu dan perwakilan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya dilibatkan dalam musrenbang desa, dan hal ini sering terjadi, yaitu mereka yang dekat atau memiliki hubungan baik dengan kepala desa dan dengan BPD/LPM. Tokoh masyarakat/pemimpin dan perwakilan kelompok masyarakat yang tergabung dalam musrenbangdes memiliki peran atau kesempatan untuk mengemukakan pendapat/pemikiran dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, namun seringkali ide/pikiran mereka sejalan dengan keinginan kepala desa karena sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dekat dan mendukung kepala desa.

Selanjutnya, untuk membuktikan hasil tingkat pengungkapan perencanaan responsif gender, maka dilakukan analisis integrasi gender terhadap program hasil SDGs Desa yakni Program Desa Terpadu. Analisis integrasi gender dalam perencanaan program SDGs Desa Kemojing mengambil implementasi pada rencana Program Desa Terpadu untuk memudahkan melakukan pengukuran sejauh mana rencana tersebut mengakomodasi kebutuhan gender di Desa Kemojing. Analisis ini dilakukan menggunakan data hasil kuisisioner yang telah dihimpun dari 90 sampel responden. Pemilihan responden menggunakan menggunakan *non probability sampling* jenis *purposive*. Besaran responden dihitung berdasarkan rumus slovin dengan derajat kepercayaan 90% ( $e = 0,1$ ). Program Desa Terpadu ini merupakan program dari hasil pemutakhiran data SDGs Desa di Kemojing sesuai arahan Kementerian Desa PDDT, berupa pembangunan sarana olahraga terpadu dan fasilitas rekreasi warga yang rencananya akan diambilkan anggaran dari Dana Desa ditahun 2022 mendatang sebesar 20%. Program ini direncanakan dan diorientasikan untuk beberapa hal yaitu: (a) melibatkan masyarakat miskin (*pro poor*) dan (b) responsif gender.

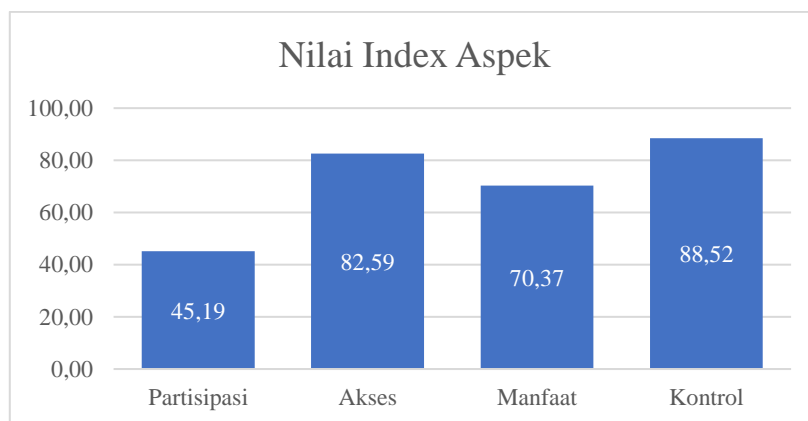
Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk mengetahui tingkat integrasi gender dalam perencanaan pembangunan desa pada Program Desa Terpadu. Terdapat 7 kriteria yang terbagi berdasarkan 4 aspek integrasi, kriteria tersebut ditetapkan berdasarkan beberapa telaah literatur dalam rubrik penelitian.



**Tabel 5.** Hasil Skoring Aspek Integrasi Gender pada Program Desa Terpadu (Analisis, 2022)

Aspek	Kriteria	Hasil (%)
Partisipasi	Mengikuti kegiatan pelaksanaan SDGs Desa	42,22
	Ikut serta dalam menyebarkan informasi	48,15
Akses	Adanya kesempatan yang sama dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya dalam program SDGs Desa.	73,33
	Peluang memberikan gagasan terkait pengambilan keputusan	98,15
Manfaat	Adanya manfaat yang diterima dari program SDGs Desa yang akan berjalan	70,37
Kontrol	Ikut serta dalam pengambilan keputusan pada rencana program SDGs Desa	95,93
	Mengambil keputusan terhadap penggunaan dana	81,11

Masing-masing kriteria di atas kemudian diberi bobot dengan nilai indeks yang telah ditentukan sebelumnya. Bobotnya tergantung pada jumlah kriteria yang dimiliki tiap aspek. Fungsi pembobotan ini bertujuan untuk membandingkan aspek integrasi gender dalam dalam Program Desa Terpadu. Setelah masing-masing kriteria diberi bobot aspek, kriteria dijumlahkan menurut aspek bagiannya. Hasil penjumlahan tersebut membantu menjelaskan perbandingan pelaksanaan keempat aspek integrasi gender dalam program desa terpadu. Nilai tersebut tertuang dalam diagram batang sebagai berikut:

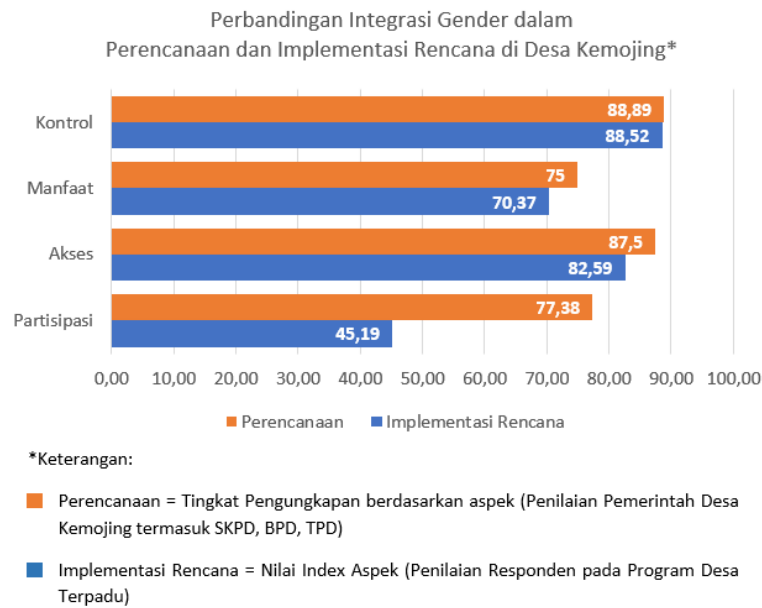
**Gambar 5.** Nilai Index Aspek Integrasi Gender pada Program Desa Terpadu (Analisis, 2022)

Pemerintah Desa Kemojing telah mempertimbangkan perspektif gender serta meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok marginal dalam program desa terpadu hasil SDGs Desa. Berdasarkan hasil pembobotan menunjukkan bahwa nilai index **aspek kontrol dan akses unggul**.

Berdasarkan pengukuran integrasi gender pada kedua hasil analisis, kemudian dilakukan perbandingan untuk mengetahui apakah memang penilaian dari pemerintah terhadap perencanaan responsif gender selaras dengan penilaian masyarakat terkait implementasi rencana melalui program desa terpadu hasil SDGs Desa.

Bila dilihat dari tingkat pengungkapan rata-rata, perencanaan pembangunan di Desa Kemojing sudah responsif gender (81,67%). Hal ini selaras dengan hasil tingkat pengungkapan berdasarkan aspek yang mayoritas sudah mencapai >70% (tinggi). Ketika dibuktikan pada rencana program desa terpadu, hasilnya pun sama bahwa aspek partisipasi dan manfaat tidak lebih unggul dari akses dan kontrol karena dalam pelaksanaan di lapangan, peran rumah tangga dinilai kurang aktif dalam menyebarkan informasi SDGs dan penyusunan program desa terpadu di lingkungan setempat dan juga manfaat yang akan diterima belum bisa dirasakan dan hanya sekedar asumsi saja dikarenakan baru berupa rencana program dan belum terwujud dalam bentuk fisik.

**Gambar 6.** Integrasi Gender dalam Perencanaan & Implementasi Rencana (Analisis, 2022)



Inti dari strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan pembangunan adalah partisipasi yang berangkat dari keikutsertaan masyarakat. Dengan cara ini, tindakan yang diidentifikasi dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah masyarakat secara lebih akurat (Choguill, 2002). Penulis menemukan fakta bahwa terdapat *gap* yang cukup signifikan dalam aspek partisipasi antara perencanaan dan implementasi rencana yang mengindikasikan bahwa selama ini perencanaan di desa masih terhambat oleh relasi kuasa pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam program SDGs desa didominasi oleh pemerintah. Di Desa Kemojing, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pembangunan desa terbatas pada kepala desa. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam konteks pembangunan desa selama ini cenderung membatasi partisipasi masyarakat karena sistem partisipasi masyarakat yang bersifat jangka panjang dan kecenderungan pemangku kepentingan untuk mendominasi proses pengambilan keputusan karena terlalu percaya diri dan kurang percaya diri terhadap kemampuan masyarakat umum.

Untuk menelusuri temuan tersebut, dilakukan kajian peran pemerintah dalam pelaksanaan SDGs Desa. Pelaksanaan SDGs Desa sampai dengan tahap perencanaan program terpadu desa dapat berjalan, salah satunya tergantung pada peran pemerintah. Pemerintah merupakan pendorong utama bagi masyarakat untuk mengambil tindakan dan berpartisipasi dalam program SDGs Desa. Persepsi masyarakat ini kemudian muncul sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembanguna desa. Artinya.pemerintah.memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program. Pada program desa terpadu, pemerintah berperan secara langsung dan juga melalui tenaga pendamping desa yang ditugaskan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat Desa Kemojing sebagai calon penerima manfaat (beneficiary).

Dalam program desa terpadu, pemerintah berperan secara langsung dan juga melalui tenaga pendamping desa yang ditugaskan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat Desa Kemojing sebagai calon penerima manfaat (*beneficiary*). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program desa terpadu ini juga berperan dalam rangka mendorong dan memastikan alokasi dana desa berpihak untuk kemanfaatan masyarakat terutama perempuan dan kelompok marjinal. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program desa terpadu digambarkan pada bagan di bawah ini:

Pemerintah desa tidak diperbolehkan melaksanakan program yang belum disepakati bersama dengan BPD. Selain itu BPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan proses penyusunan dan implementasi APBDesa. Namun sangat disayangkan bahwa dalam kondisi perencanaan eksisting, BPD Desa Kemojing sebagai pemegang kewenangan pemerintahan dan pengaturan desa cenderung hanya fokus pada pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut yang



secara matang sehingga kebutuhan yang berbeda antara laki-laki, perempuan, dan kelompok marjinal dalam pembangunan desa dapat terakomodasi dengan baik.

#### 4. KESIMPULAN

Temuan penerapan integrasi gender dalam rencana program SDGs Desa memperlihatkan terjadinya transformasi dari keadaan eksklusif sosial ke arah inklusif sosial. Berdasarkan pernyataan Gupta (2016), implementasi SDGs termasuk dalam prinsip social inclusiveness dimana kebijakan akan lebih condong kepada masyarakat bawah sebagai penerima manfaat. Dalam kondisi eksisting perencanaan Desa Kemojing memang demikian, dimana program hasil SDGs cenderung berfokus pada isu sosial di desanya. Hal ini memang bagus untuk mewujudkan inklusi sosial, namun di sisi lain juga membawa resiko implementasi yang kurang memperhatikan lingkungan (aspek ekologi). Selain itu, meski telah mengalami perbaikan, kesetaraan gender perlu mendapatkan penekanan yang lebih besar mengingat persoalan diskriminasi dan ketimpangan yang masih kerap dihadapi khususnya di desa. Dengan merujuk pada tujuan ke-5 SDGs, kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat bagi semua lapisan gender dapat lebih lugas lagi dipromosikan dalam kebijakan dan pembangunan. Mengingat pentingnya integrasi perspektif gender dihadapkan pada masih lemahnya pengintegrasian itu dalam berbagai program dan kegiatan, tidak dapat dihindari lagi, penajaman perspektif gender menjadi mendesak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan integrasi gender dalam perencanaan dan implementasi rencana pembangunan terbatas pada keterlibatan masyarakat meskipun pendekatan yang dipakai dalam SDGs Desa berupa pendekatan partisipatoris. Akibatnya, penggiringan rencana program hasil SDGs desa hanya pada kegiatan infrastruktur. Hal ini membuktikan bahwa meskipun perencanaan di Desa Kemojing sudah responsif gender, namun pemerintah Desa Kemojing belum bisa mengaktualisasikan rencana program yang segmentatif gender karena program yang dihasilkan melalui SDGs Desa justru hanya bertumpu pada aspek sosial yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat umum. Dengan adanya penelitian ini, memperlihatkan bahwa dengan memperhatikan empat aspek integrasi gender tersebut, mampu meningkatkan pendekatan pembangunan dan membantu memecahkan masalah dilapangan terkait dengan kebutuhan yang berbeda pada program pembangunan melalui SDGs Desa.

#### 5. REFERENSI

- Asian Development Bank. (2018). Strategi 2030: Mencapai Asia dan Pasifik yang Makmur, Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan. Filipina: ADB. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS189401-2>
- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243–260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.176582>
- Burgess, G. (2008). Planning and the Gender Equality Duty – why does gender matter? *People, Place and Policy Online*, 112–121. <https://doi.org/10.3351/ppp.0002.0003.0001>
- Choguill, M.B, 1996, A Ladder Of Community Participation for Underdevelopment Countries, *HABITAT INTL*, Vol 20.No. 3, pp 431-444.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Masuda, H., Okitasari, M., Morita, K., Katramiz, T., Shimizu, H., Kawakubo, S., & Kataoka, Y. (2021). SDGs mainstreaming at the local level: case studies from Japan. *Sustainability Science*, 16(5), 1539–1562. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00977-0>

- Panciroli, A., Santangelo, A., & Tondelli, S. (2020). Mapping RRI dimensions and sustainability into regional development policies and urban planning instruments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145675>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Riduwan. (2012). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Preamble. 70/1.